



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Perhubungan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan, hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Dinas Perhubungan tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Dinas Perhubungan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 81

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, Renja Dinas Perhubungan sebagai penjabaran Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Perhubungan tahun 2022 menjabarkan Grand Design Kabupaten Pasuruan dalam pencapaian kelembagaan ekonomi desa. Sebagai OPD Pendukung, Dinas Perhubungan mengampu sasaran yaitu, Interkoneksi Transportasi yang dalam penjabarannya menjadikan sarana prasarana transportasi yang terintegrasi sebagai bentuk dukungan dalam tercapainya kelembagaan ekonomi desa. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan tersebut haruslah berorientasi kepada pencapaian tujuan dan capaian program dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan usulan bidang yang disesuaikan dengan Grand Design Pembangunan Kabupaten Pasuruan pada tahun rencana serta aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar stakeholder tentang rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi

sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- o. Peraturan Pemerintah nomer 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- p. Peraturan Menteri Perhubungan No. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota
- q. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- r. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- s. Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
- u. Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 52 Tahun 2019 tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional;
- v. Kepmen 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- w. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025
- x. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029.
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan (RPJMD) Tahun 2018 – 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang perhubungan serta mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan , program dan kegiatan.

Bab IV : Berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan

Bab V : Penutup

Merupakan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tidak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra dapat diketahui dari realisasi program dan kegiatan baik yang memenuhi target kinerja yang telah ditentukan maupun yang tidak memenuhi target kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengukur sampai dimana keberhasilan OPD berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dapat dilihat dari capaian kinerja dengan memperhatikan Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan, yakni Program peningkatan pelayanan angkutan umum, Program pengembangan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan, Program peningkatan fasilitas keselamatan jalan serta Program pengamanan lalu lintas. Berikut uraian pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 :

- a. Realisasi program hampir semua memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari RPJMD maupun Renstra namun memang perlu adanya perhatian penuh dan khusus dalam pencapaian sasaran, apakah target yang terpenuhi mampu mencapai sasaran Dinas yang telah ditentukan.
- b. Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari Renstra adalah :
Dari realisasi program tahun 2020 semua program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan terealisasi 90.67 %. Faktor-faktor penyebab, terpenuhinya atau melebihi target kinerja :
 - 1) Program pelayanan administrasi perkantoran 98.10 %
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 90.21 %
 - 3) Program peningkatan pelayanan angkutan umum 91.23 %
 - 4) Program pengembangan sarana & prasarana fasilitas perhubungan 91.03 %
 - 5) Program peningkatan fasilitas keselamatan jalan 94.74 %

6) Program pengamanan lalu lintas 92.94 %

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan

1) *Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah Kabupaten Pasuruan dengan angkutan umum*

Sampai tahun 2020 Dinas Perhubungan berupaya penuh untuk mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan berupa peningkatan pelayanan angkutan seperti mengadakan angkutan sekolah dan angkutan wisata gratis guna mendukung konektivitas antar wilayah baik desa maupun kota. Hal ini diciptakan untuk membangun aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah guna meningkatkan daya saing daerah dalam upaya membangun potensi yang ada di masing-masing wilayah Kabupaten Pasuruan. Adapun indikator yang di pergunakan untuk mengevaluasi adalah dengan menghitung persentase wilayah yang terkoneksi angkutan yaitu jumlah ruas jalan yang terlayani angkutan dibagi dengan jumlah ruas jalan kabupaten yang tersedia dikalikan 100 persen. Tercapainya konektivitas wilayah terhadap angkutan dapat dilihat dalam program kegiatan yang sudah di rencanakan oleh Dinas Perhubungan dalam program peningkatan pelayanan angkutan dan program pengembangan sarana dan prasarana perhubungan. Pada kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah, kegiatan tersebut mampu membantu meningkatkan jumlah ruas yang terlayani angkutan sebanyak 5 ruas jalan, meskipun pada tahun 2019 ruas jalan yang terkoneksi angkutan telah turun hampir 50% dari tahun 2018. Dimana pada tahun tersebut telah di gunakan sebagai tahun dasar perhitungan jumlah angkutan yang terkoneksi dan jumlah ruas jalan yang ada.

Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan berupaya menurunkan angka kecelakaan, melalui upaya-upaya nyata dalam kegiatan yang di rencanakan oleh Dinas perhubungan, upaya tersebut antara lain memberikan penyuluhan terhadap supir angkutan dan kalangan muda siswa siswi sekolah yang telah menerima surat Ijin Mengemudi dalam mengenal rambu-rambu, isyarat lampu dan marka jalan serta kesopanan berkendara di jalan raya. Hal ini merupakan upaya dalam menurunkan angka kecelakaan.

Adapun Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja penurunan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang dihitung berdasarkan jumlah kecelakaan tahun ini di kurangi jumlah kecelakaan tahun lalu dibagi jumlah kecelakaan tahun ini di kali 100 persen.

Penyebab penurunan angka kecelakaan didukung oleh :

1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas;
2. Meningkatnya budaya tertib berlalu lintas;

3. Terlaksananya program Peningkatan fasilitas keselamatan jalan yaitu dengan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka, warning light dll) di tempat yang berpotensi rawan kecelakaan.
- d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.
- Meningkatkan jumlah prasarana angkutan jalan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - Meningkatkan jumlah perlengkapan jalan yang terpasang untuk mengurangi angka kecelakaan
 - Meningkatkan disiplin pengguna jalan (mobil penumpang umum) dengan melakukan operasi gabungan penertiban teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
 - Mengadakan sosialisasi kepada pengguna jalan terutama pelajar, sopir angkutan umum dan pengemudi becak
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mempunyai keahlian teknis di bidang perhubungan

Tabel 2.1 / T.C - 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN DAN
PERCAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN S/D TAHUN 2021 (TAHUN Berjalan)
KABUPATEN PASURUAN

KODE	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Perhubungan) tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun n-3/2019	target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun n-2 / 2019			Target Program dan kegiatan (Renja PD Tahun n-1/2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun Berjalan n-1/2021	
					Target Renja PD Tahun n-2/2020	Realisasi Renja PD tahun N-2/2020 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun n-1/2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
2,15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentas pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	12.245.585.823						2.385.409.090	19,52
2,15.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		83.995.400						0	-
2,15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencana perangkat daerah	7.400.000						0	-
2,15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	11.600.400						0	-
2,15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah makanan dan minuman rapat yang diadakan	64.995.000						0	-
2,15.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	10.523.243.160						2.229.452.278	21,19

2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	9.037.893.160						2.028.991.476	22,45
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas kegiatan kantor / lapangan melalui perjanjian / perikatan	1.485.350.000						200.460.802	13,50
2.15.01.2.02	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Terpenuhinya tertib administrasi barang milik daerah yang terasuransi	48.457.780						0	
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik SKPD yang di asuransikan	48.457.780						0	-
2.15.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	534.910.990						35.917.200	6,81
2.15.01.2.03.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	45.973.690						12.497.500	27,18
2.09.2.09.01.25.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pembelian ATK	39.99.500						0	-
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	60.001.800						5.732.200	9,55
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bacaan surat kabar	79.870.000						6.572.500	8,23
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu	54.990.000						9.165.000	16,67

2,15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	254.076.000						1.950.000	0,77
2,15.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya barang milik daerah yang sesuai	38.759.000						0	-
2,15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	38.759.000						0	-
2,15.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Penyediaan Jasa	419.588.274						54.614.012	13,02
2,15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan listrik selama 12 bulan	319.994.774						40.534.262	12,67
2,15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium pejabat penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang / jasa	99.593.500						14.079.750	14,14
2,15.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	596.631.219						65.425.600	10,97
2,15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	339.995.275						38.602.300	11,35
2,15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21.665.000						0	
2,15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung / kantor	49.976.944						0	

2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung / kantor	184.994.000						26.823.300	14,50
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		12.627.874.133						1.526.493.750	12,09
2.15.02.2.02	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	6.363.372.375						237.435.000	3,73
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang	2.909.043.575						146.135.000	5,02
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.454.328.800						91.300.000	2,64
2.15.02.2.03	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	Presentase Pengelolaan Terminal	39.953.888						0	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terminal	39.953.888						0	
2.15.02.2.04	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	presentase terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	4.970.000.000						931.508.750	18,74
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah laporan parkir yang dikelola	4.970.000.000						931.508.750	18,74
2.15.02.2.05	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Presentase Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	716.154.180						357.550.000	49,93

2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Uji yang Diadakan	200.000.000							0	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Teregistrasi	114.054.180							45.050.000	39,50
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji yang Disediakan	312.500.000							312.500.000	100
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	89.600.000							0	
2.15.02.2.06.01	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jaringan Jalan Kabupaten	484.992.730							0	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	299.998.030							0	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Jalan Kabupaten	184.994.700							0	
2.15.02.2.09	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang / Barang Dalam 1 Daerah Kabupaten	28.399.500							0	
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Terangkut	18.399.500							0	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Angkutan Umum	10.000.000							0	
2.15.02.2.11	PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Perkotaan	9.998.660							0	

2,15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang Dibuat	9.998.660							0
2,15.02.2.14	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Kabupaten / Kota Dalam Daerah Kabupaten	15.002.800							0
2,15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah pengusaha yang melaksanakan fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan	15.002.800							0
2.09.2.09.01.23	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM	Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan								
2.09.2.09.01.23.01	Fasilitas Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Jasa Pelayanan Angkutan		93.429,000	621.320.000	90.101.500	96,44			
2.09.2.09.01.23.02	Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah	Jumlah Siswa/Masyarakat yang menggunakan Angkutan Umum		101.841.000	400.000.000	56.730.000	55,70			
2.09.2.09.01.23.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Angkutan	Jumlah Laporan Hasil Monev Angkutan		4.011.000	40.000.000	4.011.000	100			
2.09.2.09.01.23.04	Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji		633.664.000	709.500.000	609.078,050	96,12			
2.09.2.09.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN	Nilai Indeks Kelancaran								
2.09.2.09.01.24.01	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya Sarana Fasilitas Perhubungan yang Dipelihara		115.891.000	782.200.000	49.610.000	42,81			
2.09.2.09.01.24.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Transportasi	Jumlah Laporan Hasil Monev Pengembangan Sarana &		117.375.000	140.000.000	108.455,000	92,40			

		Prasarana Fasilitas Perhubungan								
2.09.2.09.01.24.04	Sistem Informasi Managemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Pemasangan Titik Rawan Kecelakaan		965.027.000	1.250.000.000	920.987.148	95,44			
2.09.2.09.01.24.05	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen yang Dibuat		28.840.000	100.000.000	28.800.000	96,13			
2.09.2.09.01.24.06	Pengembangan Sarana & Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Alat Pengujian yang di Rehabilitasi dan Diadakan		163.980.000	1.154.800.000	159.711.200	97,40			
2.09.2.09.01.25	PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Guardrail, dll) pada Jalan Kabupaten								
2.09.2.09.01.25.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Hasil Monev Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan		11.330.000	30.000.000	11.330.000	100			
2.09.2.09.01.25.02	Pembangunan Fasilitas keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang		529.750.000	2.250.611.000	523.220.800	98,77			
2.09.2.09.01.25.03	Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpelihara		889.757.650	2.688.707.650	845.105.000	94,98			
2.09.2.09.01.25.04	Evaluasi Kinerja Pelayanan Ruas Jalan dan Simpang	Jumlah Evaluasi Kinerja Pelayanan Ruas Simpang yang di Evaluasi			40.000.000					
2.09.2.09.01.25.05	Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan	Jumlah Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan yang di Evaluasi		26.200.000	30.000.000	23.700.000	90,46			
2.09.2.09.01.25.06	Koordinasi Peningkatan Keselamatan LLAJ	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi		256.662.000	426.000.000	220.120.000	85,76			
2.09.2.09.01.26	PROGRAM PENGAMANAN LALU LINTAS	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Perparkiran								

2.09.2.09.01.26.01	Pelayanan Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Laporan Hasil Pengaturan & Pengamanan Lalu Lintas	500.540.000	745.000.000	474.765.000	94,85			
2.09.2.09.01.26.02	Pengelolaan Terminal	Laporan Hasil Pengelolaan Terminal	64.913.000	95.000.000	64.663.000	99,61			
2.09.2.09.01.26.03	Pengelolaan Perparkiran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Parkir	4.347.024.000	5.550.328.000	4.026.224.630	92,62			
0.09.2.09.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	298.800.000	298.800.000	274.940.605	92,01			
2.09.2.09.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelolaan Keuangan	119.640.000	122.115.000	114.870.000	96,01			
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis yang di Adakan	50.000.000	50.000.000	49.855.000	99,71			
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang diadakan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	100			
2.09.2.09.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan & Perlengkapan Kantor	124.250.000	124.250.000	124.250.000	100			
2.09.2.09.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Orang yang Terlayani Makan dan Minum	56.000.000	138.000.000	56.000.000	100			
2.09.2.09.01.01.18	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	172.581.632	308.672.200	172.580.771	100			
2.09.2.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Tenaga Kontrak yang Dibayar	843.600.000	957.850.000	843.600.000	100			
2.09.2.09.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan yang Diasuransikan	50.000.000	50.000.000	49.967.980	99,94			
2.09.2.09.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang Telah Berizin	30.000.000	30.000.000	29.400.000	98,00			
2.09.2.09.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Pembelian Komponen Instalasi Listrik & Bangunan Kantor	12.980.000	12.980.400	12.980.000	100			

2.09.2.09.01.01.14	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah Pembelian Peralatan Rumah Tangga			27.280.000					
2.09.2.09.01.01.22	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Terbina	89.864.000		441,844.350	82.715.000	92,04			
2.09.2.09.01.02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur								
2.09.2.09.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair			48.500.000					
2.09.2.09.01.02.11	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah/Jenis Pengadaan Peralatan Kantor			95.000.000					
2.09.2.09.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	400.000.000		400,000.000	400.000.000	100			
2.09.2.09.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	75.000.000		350,000.000	0	0			
2.09.2.09.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	291.000.000		291,000.000	291.000.000	100			
2.09.2.09.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang Diadakan			140,000.000					
TOTAL			24.873.459.956							24.873.459.956

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 81 Tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 sebagai berikut :

- Tersedianya terminal angkutan penumpang, sampai dengan tahun 2019 Terminal Tipe C tersedia 4 unit lokasi terminal, dan 1 Terminal Tipe A telah diserahkan/ diambil alih oleh Kementerian Perhubungan.
- Telah tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan dengan dibentuknya UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Akreditasi "B".
- Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan antara lain :
 - a. Rambu jalan telah terpasang sebesar 939 unit + 134 unit sehingga total menjadi 1073 unit
 - b. Jumlah marka jalan yang telah terpenuhi sebesar 17.895 m²
 - c. Jumlah guardrail yang terpasang sebesar 820 m + 592 m
 - d. Jumlah Paku jalan yang terpasang 1.180 unit + 130 unit menjadi 1.310
 - e. Jumlah Delineator jalan yang terpasang 320 unit
 - f. Jumlah cermin tikungan jalan yang terpasang 84 unit
 - g. Jumlah warning light jalan yang terpasang 29 unit
 - h. Jumlah traffic light jalan yang terpasang 14 unit
 - i. Jumlah pelican crossing jalan yang terpasang 5 unit
 - j. Jumlah Early Warning jalan yang terpasang 1 unit
 - k. Jumlah Running Text yang terpasang 7 unit
 - l. Jumlah CCTV yang terpasang 19 titik + 5 Titik menjadi 24 titik

Tabel 2.2 / T.C - 30
PENCAPAIAN PELAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

NO	INDIKATOR	SPM/STANDART NASIONAL	IKK	Target Restra PD				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1		
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	IKU												
	Indikator Tujuan												
	Presentase Aksebilitas Transportasi												
	Indikator SPM												
	1. Prosentase Wilayah Yang terkoneksi angkutan umum			11,29	12,17	13,04	13.29	7.91	-	100%	100%		
	Indikator SPM 2. Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan			-2.84	-2.93	-3.015	-3.21	-19.44	-	100%	100%		

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan antara lain :

- Program dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yaitu Dekade Keselamatan Jalan Indonesia Tahun 2011-2020 yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia harus didukung penuh oleh Dinas Perhubungan untuk mengurangi angka kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia.
- Program dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
- Sesuai Peraturan Presiden No 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan menyebutkan bahwa Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Sebagai wilayah yang termasuk dalam Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini Dinas Perhubungan, ikut berperan dalam pengembangan wisata di wilayah Penanjakan Bromo Kecamatan Tosari.
- Serta Pengembangan MINAPOLITAN yang akan ikut dikembangkan maka peranan Dinas perhubungan untuk memberikan petunjuk jalan serta mengembangkan kawasan menuju wilayah MINAPOLITAN tersebut. Untuk sementara kawasan wilayah yang ditunjuk adalah Grati, Rejoso dan Lekok.
- Pengembangan kawasan wisata di wilayah gunung Arjuno, meliputi Purwosari, Purwodadi, Prigen berupa pengembangan angkutan umum dan fasilitas transportasi pendukung.
- Berkurangnya kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
- Tingkat kedisiplinan pengguna jalan masih rendah.
- Perlunya Peningkatan sumber daya aparatur manusia di bidang teknis perhubungan (terminal, pengujian kendaraan bermotor, MRL, Andalalin) untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,
- Kondisi pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan masyarakat berkumpul pada satu tempat tanpa adanya *physical distancing*.

Dalam menyikapi isu – isu strategis yang ada serta mendukung program Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan menindaklanjuti dengan melakukan :

- Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dengan melakukan pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, cermin tikungan, Speed Bump dan delineator serta

pengecatan marka jalan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

- Pengadaan CCTV di wilayah Kab. Pasuruan yang bertujuan untuk memantau kondisi lalu lintas dan proses pengumpulan data dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
- Terkait dengan penghematan energi, Dinas Perhubungan melakukan penggantian sumber energi untuk running text, warning light, traffic light dari tenaga listrik ke sumber tenaga alternatif (*Solar Cell*).
- Pembangunan prasarana perhubungan sebagai pendukung transportasi di wilayah Kabupaten Pasuruan.
- Meningkatkan pelayanan sarana angkutan umum dengan melakukan temu wicara pengelola angkutan umum dan penyuluhan bagi para sopir untuk peningkatan keselamatan.
- Memperketat pelayanan dan pengembangan alat uji kelayakan kendaraan bermotor khususnya kendaraan angkutan umum pada kegiatan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor.
- Melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan parkir di tepi jalan umum terutama parkir berlangganan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dinas Perhubungan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan.
- Menambahkan armada sekolah gratis serta rute jalan angkutan sekolah gratis.
- Menambahkan perencanaan pengembangan trayek angkutan pada wilayah TNBTS dan Minapolitan.
- Merencanakan Pengelolaan area parkir dan memfasilitasi sarana prasarana penunjang area pariwisata di kawasan Bromo.
- Pengadaan fasilitas keselamatan jalan di wilayah Kabupaten Pasuruan terutama di daerah Grati, Rejoso dan Lekok sebagai wilayah MINAPOLITAN.
- Pengembangan sarana prasarana pendukung di kawasan wisata Purwosari, Purwodadi dan Prigen meliputi, fasilitas perlangkapan jalan menuju area wisata dan sarana prasarana angkutan wisata.
- Retribusi PKB untuk kendaraan/angkutan umum dan pick up diberikan subsidi yang diambilkan dari retribusi kendaraan sedang dan kendaraan besar (pemilik perusahaan) guna menarik minat pemilik kendaraan umum dan pick up melakukan uji berkala kendaraan bermotor (uji kir) demi Keselamatan Lalu Lintas.
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, sopir dan stakeholder terkait untuk pelayanan di bidang perhubungan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid – 19.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara program dan kegiatan pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang diusulkan sesuai dengan tabel 2.4 terlampir.

Tabel 2.4 / T.C -31
REVIUE TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN PASURUAN

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan			
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Administrasi			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Administrasi			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	13700000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	13000000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	3dokumen	15000000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi			

			kinerja SKPD					kinerja SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	15000000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	15000000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	15000000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen		
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	15000000	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah makanan dan minum rapat yang di adakan	1 Laporan	250000000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Jumlah makanan dan minum rapat yang di adakan	1 Laporan		

2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	86 orang/bulan	10.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	81 orang/bulan	8.851.673.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah pembayaran jasa petugas kegiatan kantor / lapangan melalui perjanjian / perikatan	69 Orang/bulan	1.800.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah pembayaran jasa petugas kegiatan kantor / lapangan melalui perjanjian / perikatan	66 Orang/bulan	1.485.350.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	-	-	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	-	-	-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Perhubungan	-	-	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Perhubungan	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	4 laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	4 laporan	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Perhubungan	jumlah dokumen bahan	2 Dokumen	15.000.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Perhubungan	jumlah dokumen bahan	2 Dokumen	

			tanggapan pemeriksaan					tanggapan pemeriksaan			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	4 Dokumen	12.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	4 Dokumen		
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Dinas Perhubungan	Presentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Dinas Perhubungan	Presentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah skpd	1 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah skpd	1 Dokumen		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	jumlah barang milik SKPD yang di asuransikan	12 unit	55.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	jumlah barang milik SKPD yang di asuransikan	12 unit	25.000.000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 kegiatan	30.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12 kegiatan		

	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD	12 laporan	20.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD	12 laporan		
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD	-	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD	-		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	4 kegiatan	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	4 kegiatan		
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Dinas Perhubungan	Prosentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Dinas Perhubungan	Prosentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Perhubungan				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Perhubungan				
	pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Dinas Perhubungan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150 unit	105.000.000	pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Dinas Perhubungan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150 unit		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi	2 dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi	2 dokumen		

			Kepegawaian					Kepegawaian			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 kegiatan	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 kegiatan		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Perhubungan	Jumlah monev dan penilaian kinerja pegawai	4 laporan	10.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Perhubungan	Jumlah monev dan penilaian kinerja pegawai	4 laporan		
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Dinas Perhubungan	Jumlah Pegawai yang Pensiun	-	-	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Dinas Perhubungan	Jumlah Pegawai yang Pensiun	-		
	Pemindahan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah PNS yang dipindah tugaskan	-	-	Pemindahan Tugas ASN	Dinas Perhubungan	Jumlah PNS yang dipindah tugaskan			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perhubungan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perhubungan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan	50 orang	25.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi	50 orang		

			perundang-undangan					peraturan perundang-undangan			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	50 orang	100.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	50 orang		
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 unit	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 unit		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	35 unit	130.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	35 unit		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	5.000.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Pembelian ATK	70 jenis	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Pembelian ATK	70 jenis	10.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	2500 buku	80.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	2500 buku	10.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6935 bacaan	120.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6935 bacaan		
	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Perhubungan	Jumlah bahan material yang tersedia		-	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Perhubungan	Jumlah bahan material yang tersedia			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan	jumlah tamu yang difasilitasi	1400 orang	80.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Perhubungan	jumlah tamu yang difasilitasi	1400 orang	20.000.000	
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	450 kali	450.000.000	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	450 kali	10.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perhubungan	jumlah arsip dinamis yang dikelola	-	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perhubungan	jumlah arsip dinamis yang dikelola	-	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perhubungan	jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis	4 kegiatan	3.200.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perhubungan	jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis	4 kegiatan		

			elektronik					elektronik			
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinas Perhubungan	Prosentase barang milik daerah yang diadakan			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Dinas Perhubungan	Prosentase barang milik daerah yang diadakan			
	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	2 unit	550.000.000	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	2 unit		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	5 unit	3.100.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	5 unit		
	Pengadaan Alat Besar	Dinas Perhubungan	Jumlah Pengadaan Alat Besar	1 unit	2.000.000.000	Pengadaan Alat Besar	Dinas Perhubungan	Jumlah Pengadaan Alat Besar	1 unit		
	Pengadaan alat angkut darat tak bermotor	Dinas Perhubungan	-	-	-	Pengadaan alat angkut darat tak bermotor	Dinas Perhubungan	-	-		
	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah pengadaan mebel	15 Unit	150.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah pengadaan mebel	15 Unit		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	jumlah pengadaan peralatan dan mesin			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	jumlah pengadaan peralatan dan mesin			

	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perhubungan				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perhubungan				
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas Perhubungan				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Dinas Perhubungan				
	Pengadaangedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Perhubungan				Pengadaangedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Perhubungan				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	jumlah/jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	20 unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	jumlah/jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	20 unit		
7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Perhubungan	prosentase penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintahan			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Dinas Perhubungan	prosentase penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintaha n			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	228 Rekening Bulanan	370.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Jumlah pembayaran telpon, air dan internet	228 Rekening Bulanan	319.994.774	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Jumlah surat yang di kirim melalui jasa	100 Kali	2.000.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Jumlah surat yang di kirim melalui jasa	100 Kali		
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Penyedia Jasa Layanan Umum Kantor	276 Orang Bulan	150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Jumlah Penyedia Jasa Layanan Umum Kantor	276 Orang Bulan		
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perhubungan	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara daerah			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau dinas yang dalam pemeliharaan /rehabilitasi	45 Unit	450.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau dinas yang dalam pemeliharaan /rehabilitasi	45 Unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	45 Unit	350.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	45 Unit	21.665.000	

			Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Perhubungan						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dinas Perhubungan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas Perhubungan						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas Perhubungan		
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah mebel yang dipelihara	200 unit	20.000.000			Pemeliharaan Mebel	Dinas Perhubungan	Jumlah mebel yang dipelihara	200 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	10 unit	24.000.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	10 unit
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perhubungan						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Dinas Perhubungan		
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dinas Perhubungan						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Dinas Perhubungan		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	7 unit	350.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perhubungan	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	7 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana	80 Unit	300.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Dinas Perhubungan	Jumlah Sarana dan	80 Unit

	Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi			Kantor atau Bangunan Lainnya		Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Dinas Perhubungan	jumlah tanah yang dipelihara/rehabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Dinas Perhubungan	jumlah tanah yang dipelihara/rehabilitasi	-	-	-
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Pasuruan	presentase wilayah yang terlayani angkutan umum di jaringan jalan kabupaten			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabupaten Pasuruan	presentase wilayah yang terlayani sarana angkutan umum keselamatan di jaringan jalan kabupaten			
			presentase wilayah yang tersedia jaringan jalan yang terpasang fasilitas keselamatan jalan					presentase wilayah yang tersedia jaringan jalan yang terpasang fasilitas keselamatan jalan dan prasarana perhubungan			

							n			
9	PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase penetapan rencana induk jaringan LLAJ			PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen pendukung penetapan rencana induk jaringan LLAJ		
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Kabupaten Pasuruan	jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	20 dokumen	960,000,000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen pendukung penetapan	2 dokumen	30.000.000
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Penetapan Kebijakan yang disosialisasikan	3 kegiatan	60,000,000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten yang dilaksanakan	3 kegiatan	
	Pengendalian pelaksanaan rencana induk LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk LLAJ	5 kegiatan	1,270,500,000	Pengendalian pelaksanaan rencana induk LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten yang dilaksanakan	5 kegiatan	10.000.000
10	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	Presentase ketersediaan perlengkapan jalan			PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang		

	Pembangunan Gedung Terminal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah gedung terminal yang dibangun			Pembangunan Gedung Terminal	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Gedung Terminal yang dibangun			
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kabupaten Pasuruan	jumlah sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang dibangun	8 unit	561,250,000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kabupaten Pasuruan	Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana yang dikembangkan	8 unit	30.000.000	
	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Kabupaten Pasuruan	jumlah prasarana fasilitas perhubungan yang dipelihara	6 unit	280,000,000	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Kabupaten Pasuruan	Jumlah fasilitas utama dan pendukung yang dipelihara	6 unit	15.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SDM yang melaksanakan pelatihan	50 orang	125,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kabupaten Pasuruan	Jumlah SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C yang mengikuti diklat	50 orang		
12	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	Kabupaten Pasuruan	presentase terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir			PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	Kabupaten Pasuruan	Jumlah wilayah yang diselenggarakan parkir			

	A							terpasang			
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Prasarana Jalan Terbangun	20 unit	600,000,000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kebutuhan prasarana perhubungan yang terbangun	20 unit		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Kabupaten Pasuruan	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang	1201 unit 12 unit	2.456.000.000 150.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan yang terpasang	1201 unit 12 unit	50.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kabupaten Pasuruan	jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah prasarana perhubungan yang terehab	1 paket	20.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten Pasuruan	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpelihara	120 titik 1270 m	2,325,240,600	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten Pasuruan	Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan yang terpasang	120 titik 1270 m		
11	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	Kabupaten Pasuruan	presentase pengelolaan terminal			PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	Kabupaten Pasuruan	presentase pengelolaan terminal			
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal tipe c	Kabupaten Pasuruan	jumlah dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan	1 dokumen	20,000,000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal tipe c	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen rencana pembangunan terminal penumpang tipe C	1 dokumen		

	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraab dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Pasuruan	jumlah laporan parkir yang dikelola	12 laporan	6,215,517,000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraab dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Pasuruan	jumlah laporan parkir yang dikelola	12 laporan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanan Parkir	10 kali	960,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanan Parkir	10 kali	150.000.000	
13	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Dinas Perhubungan	presentase pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor			PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Dinas Perhubungan	presentase pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	jumlah alat uji yang di diadakan	3 unit	365,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	jumlah alat uji yang di diadakan	3 unit		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan	Dinas Perhubungan	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan PKB	20 orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	20 orang		

Bermotor							PKB			
Registarsi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	jumlah kendaraan yang melaksannakan Pengujian	20000 kendaraan	79,200,000	Registarsi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah kendaraan yang melaksannakan Pengujian	20000 kendaraan	100.000.000	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Bukti Lulus Uji yang dikeluarkan	18000 buah	504.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Bukti Lulus Uji yang dikeluarkan	18000 buah	100.000.000	
Sosialisasi Standar Operaional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Sosialisasi SOP Pengujian Kendaraan Bermotor	4 kali	6.540.000	Sosialisasi Standar Operaional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah Sosialisasi SOP Pengujian Kendaraan Bermotor	4 kali		
identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan hasil analisis Potensi Kendaraan Wajib Uji	12 kali	4.320.000	identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Dinas Perhubungan	Jumlah Laporan hasil analisis Potensi Kendaraan Wajib Uji	12 kali		
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	jumlah alat ujin yang di pelihara	3 unit	90.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	jumlah alat ujin yang di pelihara	3 unit	90.000.000	
Koordinasi Penyelenggaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan			Koordinasi Penyelenggaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan			

	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah kegiatan Penetapan Tarif Retribusi	1 kegiatan	3.500.000	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Jumlah kegiatan Penetapan Tarif Retribusi	1 kegiatan		
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	jumlah monev yang dilaksanakan	1 kegiatan	3.500.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	jumlah monev yang dilaksanakan	1 kegiatan		
14	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA A	Kabupaten Pasuruan	presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten			PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten			
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa pada Jar Jalan Kabupaten	4 kegiatan	180,000,000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa pada Jar Jalan Kabupaten	4 kegiatan	10,000,000	
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu	Kabupaten Pasuruan	jumlah perlengkapan jalan yang diadakan dan dipasang dalam rangka manajemen	5 lokasi	150,000,000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kabupaten Pasuruan	jumlah perlengkapan jalan yang diadakan dan dipasang dalam rangka manajemen	5 lokasi		

	Lintas		rekayasa lalin				rekayasa lalin			
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa lalin	4 kegiatan	30,000,000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa lalin	4 kegiatan	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian	240 kegiatan	2,585,003,800	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian	240 kegiatan	50.000.000
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pelaksanaan Forum LLAJ	12 kegiatan/bulan	600,000,000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Pelaksanaan Forum LLAJ	12 kegiatan/bulan	20.000.000
15	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase hasil persetujuan andalalin			PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase hasil persetujuan andalalin		
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen andalalin yang ditetapkan	6 kegiatan	300,000,000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen andalalin yang ditetapkan	6 kegiatan	40.000.000
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Kabupaten Pasuruan	jumlah SDM yang melaksanakan pelatihan	2 orang	50,000,000	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Kabupaten Pasuruan	jumlah SDM yang melaksanakan pelatihan	2 orang	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kabupaten Pasuruan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	48 kegiatan	48,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kabupaten Pasuruan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	48 kegiatan		
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kabupaten Pasuruan	jumlah pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang ditetapkan	12 kegiatan	24,000,000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kabupaten Pasuruan	jumlah pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang ditetapkan	12 kegiatan	30,000,000	
16	AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ	Kabupaten Pasuruan	presentase pelaksanaan audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ			AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ	Kabupaten Pasuruan	presentase pelaksanaan audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ			
	peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ	Kabupaten Pasuruan	jumlah SDM yang melaksanakan diklat/bimtek auditor dan inspektor LLAJ	2 orang	40,000,000	peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ	Kabupaten Pasuruan	jumlah SDM yang melaksanakan diklat/bimtek auditor dan inspektor LLAJ	2 orang		
	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Kabupaten Pasuruan	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	12 kegiatan	120,000,000	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Kabupaten Pasuruan	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	12 kegiatan	15,000,000	

	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Kabupaten Pasuruan	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	4 kegiatan	40,000,000	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	Kabupaten Pasuruan	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	4 kegiatan	20,000,000	
	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kabupaten Pasuruan	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit			pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kabupaten Pasuruan	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	4 kegiatan	30.000.000	
	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor kab/kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	12 kegiatan	180,000,000	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor kab/kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	12 kegiatan		
17	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang / barang dalam 1 daerah kabupaten			PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang / barang dalam 1 daerah kabupaten			
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	Kabupaten Pasuruan	jumlah siswa/masyarakat yang menggunakan	2 kegiatan	500,000,000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	Kabupaten Pasuruan	jumlah siswa/masyarakat yang menggunakan	2 kegiatan	60.000.000	

	Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten		angkutan umum			(satu) Daerah Kabupaten		n angkutan umum			
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum	4 kegiatan	25,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum	4 kegiatan	5.071.456	
18	PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan yang melampaui batas 1 kabupaten dalam 1 kabupaten			PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan yang melampaui batas 1 kabupaten dalam 1 kabupaten			
	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen penetapan kawasan perkotaan			Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen penetapan kawasan perkotaan		10.000.000	

	Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah sosialisasi dan Uji coba penetapan kawasan Perkotaan	1 kegiatan	12,500,000	Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah sosialisasi dan Uji coba penetapan kawasan Perkotaan	1 kegiatan		
19	PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUAPTEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan			PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUAPTEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan			
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang disusun	1 dokumen	60,000,000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang disusun	1 dokumen	25,000,000	
	penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah sosoaliasi Kebijakan yang dilaksanakan			penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah sosoaliasi Kebijakan yang dilaksanakan			
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1	Kabupaten Pasuruan	jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah	Kabupaten Pasuruan	jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan			

	(satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rencana Umum jaringan trayek perkotaan			Kabupaten/Kota		Rencana Umum jaringan trayek perkotaan			
20	PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Kabupaten Pasuruan	presentase penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan			PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan			
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	1 dokumen	190,000,000	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	1 dokumen	30,000,000	
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah sosialisasi dan uji coba pelaksanaan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan	1 kegiatan	50,000,000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah sosialisasi dan uji coba pelaksanaan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan	1 kegiatan		
21	PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN	Kabupaten Pasuruan	presentase Penetapan Wilayah Operasi			PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN	Kabupaten Pasuruan	presentase Penetapan Wilayah Operasi			

	ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi			MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi			
	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen penetapan kebijakan wilayah operasi angkutan orang dengan taksi	2 dokumen	150,000,000	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah dokumen penetapan kebijakan wilayah operasi angkutan orang dengan taksi	2 dokumen	15,000,000	
	Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan Menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kab/kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan taksi	1 kegiatan	12,000,000	Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan Menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kab/kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan taksi	1 kegiatan		
22	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah	Kabupaten Pasuruan	presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah	Kabupaten Pasuruan	presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan			

	Kabupaten/Kota		Taksi			Kabupaten/Kota		Angkutan Taksi			
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Pasuruan	Jumlah fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi	6 kegiatan	25,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Pasuruan	Jumlah fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi	6 kegiatan	15,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi		5.000.000	
23	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas kabupaten/kota dalam			PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas kabupaten/k			

			daerah kabupaten					ota dalam daerah kabupaten			
	fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kabupaten Pasuruan	jumlah fasilitasi pemenuhan izin trayek	4 fasilitasi	1,800,000	fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kabupaten Pasuruan	jumlah fasilitasi pemenuhan izin trayek	4 fasilitasi	5,000,000	
	penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah sosoaliasi Kebijakan yang dilaksanakan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah pelaksanaan pengawasan pengurusan izin trayek			
24	PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan			PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pasuruan	presentase penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan			

			dalam 1 (satu) daerah				pedesaan dalam 1 (satu) daerah			
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi Angkutan umum	1 dokumen	5,000,000	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi Angkutan umum	1 dokumen	
	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah penyediaan data Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan umum			Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah penyediaan data Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan umum		
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan tarif ekonomi angkutan umum			Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan tarif ekonomi angkutan umum		
TOTAL BELANJA					44,047,771,412					11.821.754.230

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan dari masyarakat berdasarkan dari pengumpulan informasi yang dilakukan Dinas Perhubungan baik melalui surat, pengamatan di lapangan serta usulan dalam Musrenbang. Pihak Kepolisian Resort Pasuruan banyak memberikan kontribusi selain dari masyarakat dalam memberikan kontribusi usulan kegiatan Dinas Perhubungan, hal tersebut dikarenakan tugas pokok dari kepolisian terutama Satuan Lalu Lintas yang berhubungan langsung dengan Dinas Perhubungan.

Usulan program dan kegiatan tersebut selain mendukung program aksi nasional dari Kementerian Perhubungan dalam mengurangi angka kecelakaan di jalan juga mendukung RPJMD Kabupaten Pasuruan serta tugas pokok dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Kepmendagri 050 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Dinas Perhubungan berencana menyesuaikan dan mengklasifikasi kembali program dan kegiatan dengan merujuk pada Kepmendagri 050 Tahun 2020. Maka di ketahui untuk tahun 2022 akan terdapat 2 Program 24 Kegiatan dan 124 Sub Kegiatan dalam Dinas Perhubungan :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN /LLAJ

Dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan usulan pemangku kepentingan, dilaksanakan pada beberapa sub kegiatan yang dapat secara langsung memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Berikut usulan program kegiatan para pemangku kepentingan.

TABEL 2.5 / T.C - 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN PASURUAN

DINAS PERHUBUNGAN					
No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KEBUPATEN/KOTA				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan untuk Kab/Kota	Kabupaten Pasuruan	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang	1201 unit 12 unit	Terdapat kegiatan engembangan kawasan strategis Arjuna Eco Park Rp. 150.000.000

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten Pasuruan	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpelihara	4120 titik 1270 m	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Kabupaten Pasuruan	Jumlah Prasarana Jalan Terbangun	20 unit	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kabupaten Pasuruan	jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara		
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	• purwosari	jumlah siswa/masyarakat yang menggunakan angkutan umum	2 kegiatan	Terdapat kegiatan pengembangan kawasan strategis Arjuna Eco Park

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional maupun tingkat Provinsi Jawa Timur. Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Kementerian Perhubungan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Upaya menyediakan transportasi gratis bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah, siswa siswi yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan;
2. Menyediakan pelayanan transportasi yang berkesinambungan dengan wilayah pembangunan strategis KSPN, TNBTS dan Arjuno Eco Park dalam memajukan wisata di Kabupaten Pasuruan;
3. Meningkatkan pelayanan transportasi pada wilayah strategis Kabupaten Pasuruan;
4. Pelayanan transportasi yang mendukung kelembagaan ekonomi desa;
5. Terselenggaranya manajemen operasional transportasi yang baik;
6. Memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan dan penumpang angkutan umum;
7. Mereduksi sumber - sumber kemacetan yang menjadi faktor utama keterhambatan lalu lintas;
8. Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas;
9. Membangun sistem informasi kinerja jalan (Kepadatan, V/C Ratio, Kecepatan);
10. Penyelenggaraan angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan (keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan);
11. Peningkatan kompetensi terhadap pengusaha angkutan dan pengguna jalan;
12. Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, pagar pengaman dll);
13. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang perhubungan di daerah;
14. Peningkatan pengawasan aparatur, pengguna dan fasilitas transportasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dishub Kabupaten Pasuruan

- a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan merupakan penjabaran program Kementerian Perhubungan dan Renstra Dishub Kabupaten Pasuruan, dimana dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran tersebut meliputi,

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2022
1	Meningkatkan pelayanan angkutan umum	Masyarakat yang terlayani angkutan	Jumlah wilayah yang terlayani angkutan	24 kecamatan
2	Membangun konektivitas transportasi umum dan wisata untuk mencapai keseimbangan pembangunan	Lokasi wisata yang terlayani angkutan umum	Jumlah trayek yang melewati tempat wisata	2 trayek
4	Pembangunan jalan yang dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan	Terciptanya Jalan yang berkeselamatan	Jalan yang terpasang fasilitas keselamatan jalan	75% jalan terpasang
5	Menjembatani berkembangnya transportasi umum berbasis on line	Pelayanan angkutan yang dapat terakses secara online	Jumlah pelayanan transportasi secara online	1 pelayanan angkutan
6	Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna kelancaran berlalu lintas.	Sistem informasi manajemen lalu lintas dan angkutan jalan yang terupdate	Jumlah sistem informasi manajemen lalu lintas dan angkutan jalan	1 sistem
7	Meningkatkan pelayanan transportasi sesuai dengan prosedur covid-19	Pelaksanaan pelayanan transportasi yang sesuai standar penanganan covid-19	Jumlah Pelayanan transportasi yang sesuai standar penanganan Covid-19	100%
9	Pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana	Pemenuhan sarana dan prasaran transportasi	Jumlah pembangunan dan pengembangan	17 kegiatan

	perhubungan guna meningkatkan pelayanan & kenyamanan kepada masyarakat.	untuk pelayanan masyarakat	sarana prasarana transportasi	
10	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perhubungan dengan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang perhubungan	Terlaksanan bimtek dan pelatihan tentang transportasi kepada ASN Dinas Perhubungan	20 orang

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan adalah :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah :

Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing

2. Selain visi dan misi Kabupaten Pasuruan yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan, juga harus menyinkronkan dengan program Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yaitu program Dekade Keselamatan Keselamatan Jalan Indonesia Tahun 2011-2020 yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan harus didukung penuh oleh Dinas Perhubungan untuk mengurangi angka kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia.

3. Grand Design Pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2022 yaitu Kelembagaan Ekonomi Desa.

b. Rekapitulasi program dan jumlah kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2022 dari 2 Program, 25 kegiatan dan 124 Sub kegiatan tersebut sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Administrasi Umum

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 4. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 5. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - b. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya
 - c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - e. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - g. Pemindahan Tugas ASN
 - h. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - i. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - j. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 6. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- g. Penyediaan Bahan/Material
 - h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - i. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
7. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
- a. Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Alat Besar
 - d. Pengadaan alat angkut darat tak bermotor
 - e. Pengadaan Mebel
 - f. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - h. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - i. Pengadaangedung kantor dan bangunan lainnya
 - j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - c. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - e. Pemeliharaan Mebel
 - f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - h. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - j. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN /LLAJ

10. PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA
 - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten
 - b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - c. Pengendalian pelaksanaan rencana induk LLAJ Kabupaten/Kota

11. PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA
 - a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Trotoar, Lajur Sepeda, Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki, Halte, fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut)
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten (Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, pagar Pengaman Jalan, Cermin Tikungan, Deliniator, Pita Penggaduh, Alat Pengendali Pemakai Jalan)
 - c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

12. PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal tipe c
 - b. Pembangunan Gedung Terminal
 - c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - d. Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)
 - e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

13. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraab dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas

14. PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
 - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c. Registrasi Kendaraan Wajib UjiBerkala Kendaraan Bermotor

- d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor
 - e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
 - g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - h. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - i. Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - j. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
15. PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA
- a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota
 - b. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - c. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - d. Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - e. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota
16. PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA
- a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
17. AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ
- a. Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ
 - b. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor
 - c. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal
 - d. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - e. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor kab/kota
18. PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
 - b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
19. PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA
- a. Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota
 - b. Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota
20. PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUAPTEN/KOTA
- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
21. PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
- a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
 - b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
22. PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
- a. Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota
 - b. Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan Menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kab/kota

23. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota

24. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - b. Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

25. PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terutama misi ke 3 yakni **“Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konversi lingkungan di Kabupaten Pasuruan”**. Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2022 terdiri dari 2 Program, 24 Kegiatan dan 124 Sub kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD 2022 perkiraan maju tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan untuk sumber dana APBD Kabupaten Pasuruan dapat di lihat dalam lampiran berikut :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PASURUAN**

KODE	Urusan/Bidang Pemerintahan daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN								
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan							
2.15.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Administrasi	Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Perhubungan	3 Dokumen	13.700.000	APBD		3 dokumen	15.000.000
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	1 Dokumen		APBD		1 dokumen	40.000.000
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Dinas Perhubungan	1 Dokumen		APBD		1 dokumen	20.000.000

2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Dinas Perhubungan	1 Dokumen		APBD		1 dokumen	20.000.000
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang sesuai dengan ketentuan	Dinas Perhubungan	1 Dokumen		APBD		1 dokumen	20.000.000
2.15.01.2.01.06	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	1 Dokumen		APBD		1 dokumen	20.000.000
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah makanan dan minum rapat yang di adakan	Dinas Perhubungan	1 Laporan	10.000.0000	APBD	Belum terplot pada pagu indikatif	1 Laporan	45.000.000
2.15.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	81 orang/bulan	8.851.67.3000	APBD	Kurang 3 ASN yang belum terplot	90 orang/bulan	10.935.850.530
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran jasa petugas kegiatan kantor / lapangan melalui perjanjian / perikatan	Dinas Perhubungan	69 Orang/bulan	1.485.350.000	APBD		70 orang/bulan	1.820.000.000
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Dinas Perhubungan			APBD			

2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Dinas Perhubungan	4 laporan		APBD		4 laporan	12.000.000
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	Dinas Perhubungan	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	7.000.000
2.15.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Dinas Perhubungan	4 Dokumen				4 Dokumen	15.000.000
2.15.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Presentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah skpd	Dinas Perhubungan	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	10.000.000
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah barang milik SKPD yang di asuransikan	Dinas Perhubungan	12 unit	55.000.000	APBD		14 unit	60.000.000
2.15.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perhubungan	12 kegiatan		APBD		12 kegiatan	13.000.000
2.15.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD	Dinas Perhubungan	12 laporan		APBD		12 laporan	12.000.000

2.15.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Dinas Perhubungan	4 kegiatan				4 kegiatan	7.000.000
2.15.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Dinas Perhubungan						
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Dinas Perhubungan						
2.15.01.2.05.02	pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	150 unit				170 unit	115.000.000
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	2 dokumen				2 dokumen	10.000.000
2.15.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Perhubungan	4 kegiatan				4 Kegiatan	10.000.000
2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monev dan penilaian kinerja pegawai	Dinas Perhubungan	4 laporan		APBD		4 laporan	10.000.000
2.15.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun	Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah PNS yang dipindah tugaskan	Dinas Perhubungan			APBD			

2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas Perhubungan	50 orang		APBD		60 orang	330.000.000
2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	50 orang		APBD		50 orang	45.000.000
2.15.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	Dinas Perhubungan	50 orang				50 orang	100.000.000
2.15.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	2 unit		APBD		2 unit	50.000.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perhubungan	35 unit		APBD		35 unit	130.000.000
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	10 unit	5.000.000	APBD		10 unit	45.000.000
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian ATK	Dinas Perhubungan	70 jenis	10.000.000	APBD		110 jenis	80.000.000
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	2500 buku	10.000.000	APBD		2700 buku	123.000.000

2.15.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	6935 bacaan				7020 bacaan	130.000.000
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang tersedia	Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang difasilitasi	Dinas Perhubungan	1400 orang	30.000.000	APBD		1470 orang	90.000.000
2.15.01.2.06.09	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan SKPD	Dinas Perhubungan	450 kali		APBD		550 kali	500.000.000
2.15.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip dinamis yang dikelola	Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dinas Perhubungan	4 kegiatan		APBD		4 kegiatan	5.000.000
2.15.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase barang milik daerah yang diadakan	Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Dinas Perhubungan	2 unit				2 unit	550.000.000

2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Dinas Perhubungan	5 unit		APBD		2 unit	1.200.000.000
2.15.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	Dinas Perhubungan	1 unit		APBD		1 unit	2.000.000.000
2.15.01.2.07.04	Pengadaan alat angkut darat tak bermotor		Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Dinas Perhubungan	15 Unit		APBD		15 Unit	150.000.000
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.07.09	Pengadaangedung kantor dan bangunan lainnya		Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.07.10	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah/jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Dinas Perhubungan	20 unit		APBD		15 unit	75.000.000
2.15.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	prosentase penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintahan	Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah pembayaran telpon, air dan	Dinas Perhubungan	228	319.994.774	APBD		228	380.000.000

	Daya Air dan Listrik	internet		Rekening Bulanan			Rekening Bulanan	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang di kirim melalui jasa	Dinas Perhubungan	100 Kali		APBD	150 Kali	3.000.000
2.15.01.2.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan			APBD		
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Layanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	276 Orang Bulan	99.593.500	APBD	278 Orang Bulan	160.000.000
2.15.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara daerah	Dinas Perhubungan			APBD		
2.15.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perhubungan	45 Unit		APBD	45 Unit	450.000.000
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	45 Unit	21.665.000	APBD	45 Unit	350.000.000
2.15.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Dinas Perhubungan			APBD		

2.15.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Dinas Perhubungan	200 unit		APBD		300 unit	30.000.000
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Perhubungan	10 unit		APBD		12 unit	27.000.000
2.15.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Dinas Perhubungan	7 unit		APBD			
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dalam pemeliharaan/rehabilitasi	Dinas Perhubungan	80 Unit		APBD		80 Unit	300.000.000
2.15.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	jumlah tanah yang dipelihara/rehabilitasi	Dinas Perhubungan			APBD			
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	presentase wilayah yang terlayani angkutan umum di jaringan jalan kabupaten	Kabupaten Pasuruan			APBD			

		presentase wilayah yang tersedia jaringan jalan yang terpasang fasilitas keselamatan jalan							
2.15.02.2.01	PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	presentase penetapan rencana induk jaringan LLAJ	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	Kabupaten Pasuruan	20 dokumen	300,000,000	APBD		10 dokumen	430.000.000
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan yang disosialisasikan	Kabupaten Pasuruan	3 kegiatan		APBD		3 kegiatan	80.000.000
2.15.02.2.01.03	Pengendalian pelaksanaan rencana induk LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk LLAJ	Kabupaten Pasuruan	5 kegiatan		APBD		5 kegiatan	1,270,500,000
2.15.02.2.02	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan Terbangun (Trotoar, Lajur Sepeda, Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki, Halte, fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut)	Kabupaten Pasuruan	20 unit		APBD		25	750.000.000

2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang (Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, , pagar Pengaman Jalan, Cermin Tikungan, Deliniator, Pita Penggaduh, Alat Pengendali Pemakai Jalan)	Kabupaten Pasuruan	1201 unit 12 unit	1.606.000.000	APBD		1300 unit 17 unit	2.4600.000.000 180.000.000
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah prasarana jalan yang direhabilitasi dan dipelihara	Kabupaten Pasuruan			APBD		10 unit	70.000.000
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpelihara	Kabupaten Pasuruan	120 titik 1270 m	1.325.240.600 30.000.000.000	APBD		150 titik 1310 m	2,450,000,000 32.000.000.000
2.15.02.2.03	PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	presentase pengelolaan terminal	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal tipe c	jumlah dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen		APBD		1 dokumen	200.000.000
2.15.02.2.03.01.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah gedung terminal yang dibangun	Kabupaten Pasuruan			APBD		3 gedung	440.000.000
2.15.02.2.03.01.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	jumlah sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang dibangun	Kabupaten Pasuruan	8 unit		APBD		6 unit	430.000.000

2.15.02.2.03.01.04	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	jumlah prasarana fasilitas perhubungan yang dipelihara	Kabupaten Pasuruan	6 unit		APBD		6 unit	280,000,000
2.15.02.2.03.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM yang melaksanakan pelatihan	Kabupaten Pasuruan	50 orang		APBD		25 orang	70.000.000
2.15.02.2.03.04	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	presentase terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.03.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraab dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah laporan parkir yang dikelola	Kabupaten Pasuruan	12 laporan	6,215,517,000	APBD		12 laporan	7.500.000.000
2.15.02.2.03.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Parkir	Kabupaten Pasuruan	10 kali		APBD		10 kegiatan	1.050.000.000
2.15.02.2.03.05	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	presentase pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.03.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana	jumlah alat uji yang di diadakan	Kabupaten Pasuruan	3 unit		APBD		3 unit	420,000,000

	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
2.15.02.2.03.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan PKB	Kabupaten Pasuruan	20 orang		APBD		20 orang	250.000.000
2.15.02.2.03.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah kendaraan yang melaksanakan Pengujian	Kabupaten Pasuruan	20000 kendaraan	145.000.000	APBD		22000 kendaraan	155.000.000
2.15.02.2.03.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji yang dikeluarkan	Kabupaten Pasuruan	20000 buah	450.000.000	APBD		22000 buah	580.000.000
2.15.02.2.03.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi SOP Pengujian Kendaraan Bermotor	Kabupaten Pasuruan	4 kali		APBD		4 kali	7.000.000
2.15.02.2.03.05.06	identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan hasil analisis Potensi Kendaraan Wajib Uji	Kabupaten Pasuruan	12 kali		APBD		12 kali	5.000.000
2.15.02.2.03.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah alat ujin yang di pelihara	Kabupaten Pasuruan	3 unit	90.000.000	APBD		4unit	110.000.000
2.15.02.2.03.05.08	Koordinasi Penyelenggaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.03.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan Penetapan Tarif Retribusi	Kabupaten Pasuruan	1 kegiatan		APBD		1 kegiatan	3.500.000
2.15.02.2.03.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah monev yang dilaksanakan	Kabupaten Pasuruan	1 kegiatan		APBD		1 kegiatan	3.500.000
2.15.02.2.03.06	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN	presentase pelaksanaan	Kabupaten Pasuruan			APBD			

	REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten							
2.15.02.2.03.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota	Jumlah Penataan Manajemen dan Rekayasa pada Jar Jalan Kabupaten	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan	180,000,000	APBD		5 kegiatan	200,000,000
2.15.02.2.03.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	jumlah perlengkapan jalan yang diadakan dan dipasang dalam rangka manajemen rekayasa lalin	Kabupaten Pasuruan	5 lokasi pokir	150,000,000	APBD		6 lokasi	170,000,000
2.15.02.2.03.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa lalin	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan	30,000,000	APBD		4 kegiatan	30,000,000
2.15.02.2.03.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian	Kabupaten Pasuruan	240 kegiatan	1.585,003,800	APBD		250 kegiatan	2,700.000.000
2.15.02.2.03.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan Forum LLAJ	Kabupaten Pasuruan	12 kegiatan/bulan	150,000,000	APBD		12 kegiatan/bulan	700,000,000
2.15.02.2.03.07	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	presentase hasil persetujuan andalalin	Kabupaten Pasuruan			APBD			

2.15.02.2.03.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Dokumen andalalin yang ditetapkan	Kabupaten Pasuruan	6 kegiatan	30,000,000	APBD		6 kegiatan	330.000.000
2.15.02.2.03.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	jumlah SDM yang melaksanakan pelatihan	Kabupaten Pasuruan	2 orang		APBD		2 orang	60,000,000
2.15.02.2.03.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	jumlah koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Kabupaten Pasuruan	48 kegiatan	48,000,000	APBD		48 kegiatan	50,400,000
2.15.02.2.03.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	jumlah pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin yang ditetapkan	Kabupaten Pasuruan	12 kegiatan	24,000,000	APBD		12 kegiatan	30,000,000
2.15.02.2.03.08	AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ	presentase pelaksanaan audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.03.08.01	peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ	jumlah SDM yang melaksanakan diklat/bimtek auditor dan inspektor LLAJ	Kabupaten Pasuruan	2 orang		APBD		2 orang	45.000.000
2.15.02.2.03.08.02	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	Kabupaten Pasuruan	12 kegiatan	80,000,000	APBD		12 kegiatan	125,000,000
2.15.02.2.03.08.03	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan	40,000,000	APBD		4 kegiatan	60,000,000
2.15.02.2.03.08.04	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	Kabupaten Pasuruan			APBD		2 Kegiatan	30.000.000

	Perusahaan Angkutan Umum								
2.15.02.2.03.08.05	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor kab/kota	jumlah pelaksanaan inspeksi dan audit	Kabupaten Pasuruan	12 kegiatan	220,000,000	APBD		12 kegiatan	200,000,000
2.15.02.2.03.09	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang / barang dalam 1 daerah kabupaten	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.03.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	jumlah siswa/masyarakat yang menggunakan angkutan umum	Kabupaten Pasuruan	2 kegiatan Pokir strategis	252,500,000	APBD		3 kegiatan	750.000.000
2.15.02.2.03.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum	Kabupaten Pasuruan	4 kegiatan	25,000,000	APBD		4 kegiatan	32.000.000
2.15.02.2.03.10	PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN YANG MELAMPAUI BATAS 1	presentase penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan yang melampaui batas 1 kabupaten	Kabupaten Pasuruan			APBD			

	(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	dalam 1 kabupaten							
2.15.02.2.03.10.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen penetapan kawasan perkotaan	Kabupaten Pasuruan			APBD		1 dokumen	50.000.000
2.15.02.2.03.10.02	Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah sosialisasi dan Uji coba penetapan kawasan Perkotaan	Kabupaten Pasuruan	1 kegiatan	12,500,000	APBD		1 kegiatan	20,500,000
2.15.02.2.03.11	PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.03.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang disusun	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen	60,000,000	APBD		1 dokumen	80,000,000
2.15.02.2.03.11.02	penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	jumlah sosoaliasi Kebijakan yang dilaksanakan	Kabupaten Pasuruan			APBD		1 kegiatan	25.000.000
2.15.02.2.03.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1	jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan	Kabupaten Pasuruan			APBD		2 kegiatan	35.000.000

	(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum jaringan trayek perkotaan							
2.15.02.2.03.12	PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PEDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.03.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen	190,000,000	APBD		1 dokumen	220,000,000
2.15.02.2.03.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah sosialisasi dan uji coba pelaksanaan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang ditetapkan	Kabupaten Pasuruan	1 kegiatan	50,000,000	APBD		1 kegiatan	50,000,000
2.15.02.2.03.13	PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN YANG WILAYAH OPERASINYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.03.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan	Jumlah dokumen penetapan kebijakan wilayah operasi angkutan orang dengan taksi	Kabupaten Pasuruan	2 dokumen	150,000,000	APBD		2 dokumen	180,000,000

	Perkotaan Kewenangan Kab/Kota								
2.15.02.2.03.13.02	Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan Menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kab/kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan taksi	Kabupaten Pasuruan	1 kegiatan	17.277.956	APBD		1 kegiatan	24,000,000
2.15.02.2.03.14	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas kabupaten/kota dalam daerah kabupaten	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.03.14.01	fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	jumlah fasillitasi pemenuhan izin trayek	Kabupaten Pasuruan	6 kegiatan	25,000,000	APBD		6 kegiatan	25,000,000
2.15.02.2.03.14.02	penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	jumlah sosoalisasi Kebijakan yang dilaksanakan	Kabupaten Pasuruan			APBD		1 kegiatan	30.000.000
2.15.02.2.03.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya	presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi	Kabupaten Pasuruan			APBD			

	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.03.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi	Kabupaten Pasuruan	4 fasilitasi	1,800,000	APBD		5 fasilitasi	2.200,000
2.15.02.2.03.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi	Kabupaten Pasuruan			APBD		2 kegiatan	5.000.000
2.15.02.2.03.16	PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI UNTUK ANGKUTAN ORANG YANG MELAYANI TRAYEK SERTA ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah	Kabupaten Pasuruan			APBD			
2.15.02.2.03.16.01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen analisis tarif kelas ekonomi Angkutan umum	Kabupaten Pasuruan	1 dokumen		APBD		1 dokumen	5,000,000

2.15.02.2.03.16.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyediaan data Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan umum	Kabupaten Pasuruan			APBD		2 kegiatan	5.000.000
2.15.02.2.03.16.03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan tarif ekonomi angkutan umum	Kabupaten Pasuruan			APBD		1 kegiatan	7.000.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG							54.334.815.630		

BAB V PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra, diharapkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan bersinergi. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Di dalam upaya tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, perlu adanya pelaksanaan kegiatan yang lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan bersinergi. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian khusus pada peningkatan pelayanan angkutan umum pada masyarakat yang aman, selamat dan nyaman; pembangunan prasarana perhubungan yang mendukung peningkatan pelayanan transportasi bagi masyarakat; peningkatan pelayanan transportasi yang mendukung wilayah strategis baik sarana maupun prasarana yang melayani maupun mendukung pelayanan di sekitar wilayah strategis, serta peningkatan keselamatan lalu lintas baik dari segi sarana maupun sosialisasi kepada sopir dan masyarakat penggunaan angkutan.

Berdasarkan kaidah – kaidah pelaksanaan kegiatan yang berpedoman pada RPJMD 2018-2023 dan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2018-2023 serta pengadaan sarana dan fasilitas LLAJ dengan menggunakan teknologi yang efisien dalam suatu kesatuan jaringan transportasi nasional (Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan), terdapat rencana tindak lanjut kegiatan di bidang perhubungan sesuai dengan arah kebijakan Kabupaten Pasuruan pada Tahun Anggaran Selanjutnya yang berkesinambungan dengan sasaran yang diampu Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat dengan adanya Revolusi Industri 4.0 membawa berbagai macam teknologi seperti Artificial Intelligence, Big Data, Cloud Computing dan Internet of Things, Dinas Perhubungan diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanannya berbasis teknologi tersebut. Penerapan teknologi tersebut yang berkaitan dengan transportasi telah banyak diaplikasikan di kota – kota di seluruh dunia, seperti Smart Parking, Autonomous Car, Automatic Vehicle Detection & Counting, dan sebagainya dapat menjadi referensi Dinas Perhubungan dalam menjalankan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) yang berujung dalam mendukung Smart City. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sebagian infrastruktur seperti CCTV yang telah ditempatkan ke dalam 23 (dua puluh tiga) titik yang dalam perencanaan kedepannya dapat diaplikasikan menggunakan Automatic Vehicle Detection & Counting sehingga dapat mengambil data yang berguna dalam perencanaan dan kebijakan selanjutnya atau yang biasa disebut data-driven based decision. Perencanaan Dinas Perhubungan ke depan diharapkan dapat mewujudkan pelayanan berbasis elektronik dalam memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanannya sehingga masyarakat puas. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, terkait Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya diperlukan perencanaan – perencanaan yang matang untuk menjawab tantangan tersebut. Selain itu, pengoptimalan anggaran sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran.

Dokumen Renja (Rencana Kerja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan, disusun berpedoman kepada Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, serta Dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF